

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

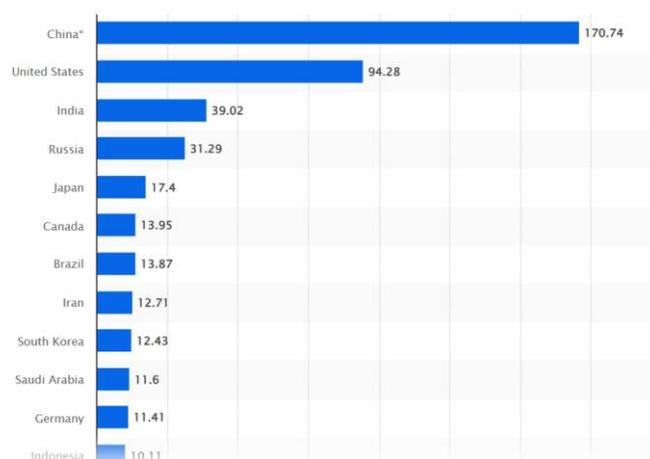
Isu lingkungan mulai muncul dalam agenda internasional pada tahun 1972, ketika diselenggarakan “*The United Nations Conference on the Human Environment*” di Stockholm, dimana konferensi ini menyoroti hubungan antara pembangunan ekonomi dan degradasi lingkungan. Isu lingkungan merupakan masalah lintas batas karena : (1) sumber daya bergerak melintasi negara; (2) aktivitas di laut, seperti pengiriman barang dan migrasi spesies asing, berdampak pada beberapa negara; dan (3) laut menjadi media penyebaran polutan. Kesadaran akan masalah ini mendorong perlunya penyelesaian secara kolaboratif. Konferensi Stockholm menjadi penting sebagai platform bagi negara-negara untuk mengidentifikasi tantangan lingkungan dan mencari solusi berbasis penelitian dan teknologi. Pada tahun 1983, PBB membentuk *World Commission on Environment and Development* untuk menangani degradasi lingkungan, yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup negara-negara berkembang. Salah satu masalah utama adalah pencemaran, yang terjadi ketika bahan pencemar mengubah keadaan lingkungan menjadi lebih buruk. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan aktivitas manusia, di mana polutan sering kali bersifat racun dan berbahaya bagi kehidupan (Barnett & Adger, 2007).

Dalam bukunya “*The Limits to Growth*”, *Club of Rome* mengemukakan bahwa pertumbuhan industri yang pesat bersamaan dengan pertumbuhan populasi, akan berdampak pada ketersediaan sumber daya alam di bumi (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens III, 1972). Jika kondisi ini berlanjut, akan muncul krisis sumber daya dan kerusakan lingkungan. Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pemanasan global, yang diakibatkan oleh bertambahnya emisi gas rumah kaca, sehingga energi matahari terperangkap di atmosfer (Sayyidati, 2017).

Fritjof Capra dalam bukunya “Filsafat Lingkungan Hidup” menjelaskan bahwa kondisi saat ini merupakan krisis yang kompleks dan mendalam, mencakup berbagai aspek dan terjadi di seluruh dunia. Krisis ini mendorong setiap negara atau orang untuk mencari solusi terhadap berbagai kekacauan yang ada (Keraf, 2014). Dalam upaya mencari solusi terhadap krisis lingkungan tersebut, negara-negara terlibat melakukan kolaborasi untuk mencapai hasil yang kolektif. Upaya ini dapat berupa perjanjian multilateral, kesepakatan regional, dan kemitraan bilateral. Tujuan dari inisiatif-inisiatif ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dari kerusakan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan terkoordinasi dan kolaboratif sangat penting untuk mengakui saling ketergantungan antar negara serta tanggung jawab bersama dalam melindungi lingkungan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat isu lingkungan memiliki dampak signifikan di negara-negara Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang menghadapi permintaan tinggi akan energi dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pembangunan.

**Gambar 1.1 *Primary energy consumption worldwide in 2023, by country***



Sumber: Energy Institute; KPMG; Kearney

Menurut laporan Energy Institute, di tahun 2023 Jepang telah menjadi salah satu dari lima konsumen energi teratas, dengan penggunaan energi yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya (KPMG & Kearney, 2024). Jepang telah mengalami peningkatan suhu dan kejadian curah hujan ekstrem sejak tahun 1980-an, dengan tahun 2019 menjadi tahun terpanas. Selain itu, negara ini juga menghadapi masalah kenaikan permukaan laut, yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi Jepang pada tahun 2020 dan 2021 (Japan Meteorological Agency, 2020, 2021).

Tren suhu tinggi yang terjadi di Jepang pun terus konsisten terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dengan tahun 2019 hingga 2024 menjadi enam tahun terpanas dalam catatan. Suhu rata-rata yang mencapai rekor tertinggi terjadi pada musim gugur tahun lalu, sementara musim panas juga mencatatkan suhu yang sama. Secara spesifik, bulan April, Juli, dan Oktober mencatat suhu tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suhu tertinggi yang tercatat di seluruh Jepang pada tahun 2024 adalah 41 derajat Celcius, yang terjadi pada 29 Juli di Sano, Prefektur Tochigi (Miura, 2025).

Gelombang panas ini berlanjut hingga musim gugur, di mana suhu di pusat Tokyo mencapai 30,1 derajat Celsius pada 19 Oktober, menjadi titik terlama dalam setahun untuk suhu di atas 30 derajat dalam 11 tahun terakhir. Setiap wilayah di Jepang, kecuali pulau utama paling utara, Hokkaido, dan Hokuriku di Jepang tengah, mencatatkan suhu rata-rata yang tertinggi. Dari 153 titik pengamatan, 111 titik, atau lebih dari 70 %, melaporkan suhu yang memecahkan rekor. Selain itu, pasca gempa dan tsunami hebat pada tahun 2011 yang menghancurkan fasilitas nuklir Fukushima, Jepang telah membuang limbah nuklir ke laut sebanyak tiga kali di tahun 2023. Keterlambatan salju di Gunung Fuji juga menunjukkan dampak musim panas yang lebih panas, yang memperlambat pembentukan salju (Miura, 2025).

Data ini menunjukkan dampak nyata dari perubahan iklim yang semakin mempengaruhi cuaca di Jepang. Tren peningkatan suhu yang konsisten mencerminkan pola global yang lebih luas, di mana banyak negara mengalami suhu ekstrem yang dapat berdampak pada ekosistem dan masyarakatnya. Krisis

lingkungan yang semakin meningkat di Asia Timur dalam beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan urgensi untuk kerja sama antara negara-negara di kawasan ini, terutama Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Berbeda dengan Eropa, dimana pelestarian lingkungan telah lama menjadi prioritas, isu ini tidak mendapat perhatian lebih di Asia Timur karena industrialisasi dan urbanisasi yang tidak terkelola (Jung, 2016).

Sebagai konsekuensinya, isu lingkungan sering kali terabaikan dalam dialog diplomatik antarnegara. Namun, dengan memburuknya krisis lingkungan pada tahun 1990-an, negara-negara Asia Timur mulai menyadari betapa seriusnya masalah ini dan mengalihkan perhatian mereka ke arah tata kelola lingkungan, sehingga persoalan lingkungan ini menjadi hal yang penting, dimana negara-negara di Asia Timur harus mulai peduli terhadap permasalahan tersebut (Zarsky & Tay, 2002). Dengan meningkatnya kesadaran tentang dampak negatif aktivitas industri terhadap lingkungan, ketiga negara kini fokus pada pengembangan kebijakan dan inisiatif untuk memperbaiki kondisi dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Selama dekade terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam kerja sama regional terkait isu lingkungan, yang ditandai dengan pembentukan berbagai forum dan perjanjian guna memperkuat upaya kolektif dalam menghadapi tantangan tersebut. Melalui langkah-langkah ini, negara-negara tersebut semakin mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan luar negeri mereka, menunjukkan komitmen yang semakin besar terhadap pelestarian lingkungan. Upaya ini tidak hanya mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi, tetapi juga keinginan untuk menciptakan solusi jangka panjang bagi tantangan lingkungan yang dihadapi.

Dalam konteks ini, sejumlah lembaga lingkungan telah didirikan. Meskipun berbagai kerangka kerja antarnegara telah ada dan hampir semua negara terkait terlibat, kerja sama trilateral yang lebih terfokus muncul dengan dibentuknya mekanisme *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) pada tahun 1999. Mekanisme ini secara khusus menyoroti kerja sama antara Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Hadirnya TEMM bertujuan untuk menanggulangi persoalan lingkungan, di mana pertemuan awal antara ketiga negara tersebut

diadakan di Korea Selatan, diikuti oleh pertemuan di Tiongkok dan Jepang pada tahun berikutnya. Pertemuan-pertemuan ini semakin memperkuat komitmen ketiga negara dalam menghadapi tantangan lingkungan, serta menciptakan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam upaya pelestarian lingkungan secara kolektif.

TEMM hadir sebagai kekhawatiran para menteri dari Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok mengenai degradasi lingkungan yang terus berlanjut di Asia Timur Laut. Degradasi yang dimaksud merujuk pada polusi yang diakibatkan oleh proses industrialisasi, di mana polusi udara menjadi salah satu isu paling mendesak. Salah satu indikator utama dari polusi udara ini adalah konsentrasi partikel halus PM2.5, yang memiliki diameter kurang dari 2,5 mikrometer membuatnya dapat dengan mudah terhirup dan masuk ke dalam sistem pernapasan manusia. Partikel ini sangat berbahaya karena dapat menembus jauh ke dalam saluran pernapasan dan masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan gangguan sistem saraf (Kamimura et al, 2017).

Peningkatan tingkat PM2.5 di kawasan ini sering kali dihubungkan dengan emisi dari sektor industri, transportasi, dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Selain itu, fenomena alam seperti *Asian Dust Storm* juga berkontribusi pada tingginya konsentrasi polusi udara, yang menyebabkan polusi bersifat lintas batas (*transboundary pollution*). Hal ini tidak hanya memengaruhi kualitas udara, tetapi juga mengakibatkan hujan asam yang merusak ekosistem dan sumber air. Dengan tingkat polusi yang semakin parah, tantangan ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Oleh karena itu, TEMM berfungsi sebagai platform penting untuk mendorong kerja sama dan tindakan bersama dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan dan mencapai keberlanjutan lingkungan di kawasan Asia Timur. Faktor-faktor seperti kesamaan geografi, budaya, tantangan lingkungan, serta kekuatan ekonomi bersama mungkin menjadi pendorong bagi kerja sama ini (Ren, 2016; Liu & Wang, 2018). Disisi lain, mereka juga menyadari pentingnya menangani perubahan iklim dan

memfasilitasi penerapan Protokol Kyoto secara cepat, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk mencapai tujuan ini, para menteri sepakat tentang pentingnya memperkuat inisiatif lingkungan domestik mereka (Joint Communique of the 1st TEMM, 1999).

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan lingkungan yang semakin mendesak, ketiga negara di Asia Timur mengidentifikasi sejumlah isu kritis yang perlu ditangani secara bersama-sama. Isu-isu tersebut meliputi pencemaran udara, pengelolaan limbah, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, serta isu lainnya (Komori, 2010). Dengan membatasi fokusnya pada kepentingan bersama ini, ketiga negara tersebut sepakat untuk mengimplementasikannya ke dalam *Tripartite Joint Action Plan on Environmental Cooperation* yang sudah dimulai pada tahun 2010 di Hokkaido dan akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali, dengan periode terbarunya TJAP di tahun 2020-2024 di pertemuan ke 21 bertempat di Jepang, yang memiliki delapan prioritas utama di dalamnya, yaitu *Air Quality Improvement, 3R/Circular Economy/Zero Waste City, Marine and Water Environment Management, Climate Change, Biodiversity, Chemical Management and Environmental Emergency Response, Transition to Green Economy, dan Environmental Education, Public Awareness and Engagement* (TEMM, 2021).

Di antara ketiga negara yang terlibat, Jepang menjadi negara yang paling aktif dalam menangani permasalahan tersebut. Sebagai negara maju, Jepang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan telah menyediakan bantuan pembangunan resmi sebesar sembilan hingga sepuluh juta yen untuk proyek-proyek lingkungan selama lima tahun, mulai dari tahun 1992. Menariknya, Jepang berhasil memenuhi janjinya satu tahun lebih awal dari yang direncanakan (Yuan, 2002; Li et al., 2017). Disisi lain, pada tahun 1997 Jepang mengusulkan pelatihan para ahli, memberikan pinjaman yang paling menguntungkan untuk proyek-proyek lingkungan, dan setuju untuk mengurangi 6% emisi gas rumah kaca pada tahun 2012 dibandingkan dengan tingkat pada tahun 1990, selama *Conference of Parties 3* (Mori, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa Jepang telah melakukan upaya signifikan untuk membangun

kontribusinya dalam tata kelola lingkungan global yang dibuatnya dalam kerja sama internasional. Dengan begitu, persoalan lingkungan menjadi hal yang negara-negara di Asia Timur harus peduli dalam menanggulangnya. Mengingat bahwa isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim tidak mengenal batas negara, kolaborasi antara ketiga negara ini menjadi krusial untuk mencapai solusi yang efektif (Otsuka, 2018).

Dalam konteks tantangan lingkungan global, perubahan iklim menjadi salah satu isu paling mendesak yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Jepang. Peningkatan suhu rata-rata, frekuensi bencana alam yang lebih tinggi, dan dampak negatif terhadap ekosistem merupakan beberapa konsekuensi yang harus dihadapi. Sehingga penelitian ini akan mengisi celah tersebut dalam menyediakan analisis mendalam terkait implementasi program TEMM terhadap penanggulangan lingkungan yang menyoroti prioritas *Tripartite Joint Action Plan on Environmental Cooperation* melalui *Climate Change* penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan dan strategi yang diambil oleh Jepang dalam menghadapi tantangan lingkungan dalam kerja sama TEMM melalui *Action Plan for Low-Carbon Society*, yang dipresentasikan pada pertemuan ke-10 di Pulau Jeju. Dalam pemaparan tersebut, Jepang mengusulkan aksi global jangka panjang untuk mengurangi total emisi gas rumah kaca hingga setengah dari level saat ini pada tahun 2050 (TEMM, 2008).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis mengangkat penelitian yang menyoroti **“Implementasi Program *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) terhadap Penanggulangan Perubahan Iklim di Jepang”** judul ini mencerminkan fokus pada bagaimana program tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap upaya penanggulangan permasalahan lingkungan melalui program yang mengatasi perubahan iklim di Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana implementasi program ini berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim serta mengeksplorasi peran Jepang dalam kerja sama trilateral ini.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan, sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Dinamika Perubahan Iklim Di Jepang?

1.2.2 Bagaimana Upaya *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) Dalam Area Prioritas Perubahan Iklim Di Jepang?

1.2.3 Bagaimana Implementasi *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) Terhadap Penanggulangan Perubahan Iklim Di Jepang Melalui *Action Plan For Low Carbon Society*?

## **1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup implementasi Program *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) dengan mengkaji kontribusi program ini dalam penanggulangan perubahan iklim di Jepang. Penelitian ini dibatasi pada upaya yang dilakukan oleh *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) dalam mengadopsi area kerja sama prioritas TEMM yang baru dalam *Tripartite Joint Action Plan* (TJAP) dalam pertemuan ke 21 yang diadakan pada tahun 2019, dimana ketiga negara tersebut memprioritaskan ke dalam delapan bidang area kerja sama, salah satunya yaitu *Climate Change* yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini sehingga memungkinkan analisis mendalam mengenai perkembangan implementasi program tersebut. Maka dari itu pembahasan masalah pada penelitian ini akan difokuskan pada tahun 2021-2024.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menganalisis dinamika kondisi lingkungan di Jepang.
- 2) Untuk mendeskripsikan upaya *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) dalam area prioritas perubahan iklim di Jepang.
- 3) Untuk menjelaskan implementasi *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) terhadap penanggulangan perubahan iklim di Jepang melalui *Action Plan For Low Carbon Society*.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

- 1) Kegunaan Teoritis: Penelitian ini memberikan tambahan referensi dalam kajian ilmu hubungan internasional, dalam bidang kerja sama lingkungan internasional di kawasan Asia Timur khususnya dalam konteks *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) dan dampaknya terhadap kebijakan perubahan iklim di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
- 2) Kegunaan Empiris: Penelitian ini bagi penulis mengembangkan keterampilan dalam menganalisis dan mengevaluasi penulisan akademis yang penting untuk penyelesaian tugas akhir, hingga membantu kewajiban sebagai mahasiswa untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi hubungan internasional Strata-1 Universitas Pasundan.

## **1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual**

### **1.5.1 Kerja Sama Trilateral**

Hadirnya kerja sama dalam hubungan internasional merupakan salah satu elemen kunci yang mendasari interaksi antara negara-negara di dunia. Dalam konteks global yang semakin kompleks, negara sering kali menghadapi tantangan yang memerlukan kolaborasi lintas batas untuk mencapai solusi yang efektif. Kerja sama ini dapat berlangsung melalui proses negosiasi yang dilakukan secara langsung, atau dapat juga terjadi karena masing-masing pihak memiliki pemahaman yang cukup, sehingga negosiasi tidak lagi diperlukan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418). Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah kerja sama trilateral, yang melibatkan kolaborasi antara tiga pihak dari negara-negara untuk mencapai tujuan bersama dan menangani masalah global yang kompleks (Martauli, 2017).

Kerja sama trilateral mengacu pada kerja sama yang dipimpin oleh pemerintah yang mencakup bidang politik keamanan, ekonomi perdagangan, dan sosial budaya. Kerja sama ini dapat berjalan dengan cara yang lebih teratur dalam membangun institusi kerja sama di antara

tiga negara atau kekuatan strategis untuk mempromosikan nilai-nilai dan tatanan tertentu (Tow, W. T. 2015). Proses ini berlangsung ketika ketiga negara sepakat untuk bertukar informasi dan melakukan koordinasi kebijakan di bidang keamanan atau domain fungsional dan pragmatis lainnya (Jo, H., & Mo, J. 2010).

Kerja sama trilateral melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk memahami dan mengatasi masalah yang sama. Dalam kerja sama ini, negara-negara dapat menggabungkan pengetahuan lokal dengan keahlian dari negara lain, sehingga mereka dapat menemukan solusi yang lebih baik. Selain itu, kerja sama ini mendorong inovasi, karena negara-negara dapat belajar dari pengalaman dan praktik yang sudah berhasil di tempat lain. Menurut laporan *United Nations Development Programme*, kerja sama trilateral sangat membantu dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi, terutama dalam isu-isu penting seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam (UNDP, 2019).

Dalam pandangannya, kerja sama trilateral menurut Keohane dalam *Multilateralism: An Agenda for Research* didefinisikan sebagai praktik koordinasi kebijakan nasional oleh tiga negara, baik melalui pengaturan *ad hoc* maupun melalui institusi. Umumnya, institusi ini terdiri dari seperangkat aturan yang terjalin secara formal dan informal, yang menentukan perilaku, membatasi aktivitas, dan membentuk ekspektasi. Dengan kata lain, istilah “trilateral” berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda “institusi”. Oleh karena itu, trilateral menggambarkan bentuk kelembagaan yang umum dalam hubungan internasional (Keohane, 1990).

Di sisi lain, dalam bukunya yang berjudul *Trilateral : The Anatomy of an Institution*, John Gerard Ruggie mengemukakan bahwa trilateral adalah institusi yang menerapkan prinsip-prinsip perilaku umum (*generalized principles of conduct*) dengan aturan yang mengatur perilaku negara anggota dalam situasi tertentu, tanpa mempertimbangkan kepentingan partikular yang mungkin ada. Ruggie juga menjelaskan dua

prinsip normatif trilateral dalam membentuk tatanan tersebut (Ruggie, 1992).

Prinsip pertama adalah ketidakterpisahan (*indivisibility*), di mana Ruggie menggambarkan bahwa prinsip perilaku yang digeneralisasi secara logis mengharuskan adanya ketidakterpisahan di antara anggota kolektivitas. Ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa masalah yang dihadapi oleh satu negara akan berdampak pada negara-negara lain. Selain itu, ketidakterpisahan kepentingan ini juga berkaitan dengan norma *Most Favoured Nations* (MFN), yang menekankan pentingnya tidak adanya diskriminasi terhadap negara-negara anggota. Prinsip kedua merujuk pada hadirnya proses timbal balik dengan memberikan manfaat yang setara (*diffuse reciprocity*). Dalam konteks trilateralisme, prinsip *indivisibility* mengharuskan adanya *diffuse reciprocity*, di mana biaya dan manfaat dibagikan di antara negara-negara anggota dengan begitu para anggota negara diharapkan dapat meraih keuntungan dalam jangka panjang (Keohane, 1990).

Kekuatan dari kerja sama trilateral ini terletak pada efisiensinya yang meningkat dalam mengurangi biaya transaksi, serta berfungsi sebagai jangkar untuk koordinasi kebijakan menuju kerangka multilateral yang lebih luas. Di sisi lain, trilateralism sangat rentan terhadap fluktuasi ketika hubungan bilateral yang mendasarinya berubah. Sementara itu, sebuah perjanjian atau institusi trilateral kemungkinan hanya akan terbentuk jika masing-masing dari ketiga aktor menyadari bahwa keuntungan dari trilateralism lebih tinggi dibandingkan jika mereka berkolaborasi dengan dua aktor lainnya melalui pendekatan bilateral masing-masing. Jika tidak, hasil kerja sama dalam kelompok trilateral cenderung akan tereduksi oleh pendekatan bilateral yang ada. Dalam hal ini, analisis rasional menunjukkan bahwa kegunaan trilateralism baik itu berhasil atau gagal merupakan hasil dari penimbangan manfaat dan biaya yang didapat (Zhang, 2024).

Kerja sama trilateral beroperasi pada tiga tingkatan, yang dapat dilihat dari sudut pandang *low politics*, *middle politics*, dan *high politics*. *Low politics* mencakup berbagai isu fungsional dan keamanan non-tradisional, seperti perlindungan lingkungan, bantuan bencana, dan bidang kemanusiaan lainnya yang cenderung tidak terpengaruh oleh konfigurasi geopolitik dan memerlukan tingkat konsensus politik yang rendah. Dengan demikian, organisasi regional diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dengan otonomi administratif yang lebih banyak (Zhang, 2024).

*Middle politics* berhubungan dengan tawar-menawar ekonomi dan politik yang rumit dalam bidang perdagangan dan keuangan. Terutama, negosiasi perdagangan dianggap sebagai isu yang sangat kompleks karena melibatkan kepentingan bisnis dan tawar-menawar politik. Perjanjian perdagangan bukan hanya kesepakatan antara pemerintah nasional, tetapi juga berdampak pada redistribusi kepentingan di berbagai sektor industri dalam masing-masing negara anggota (Zhang, 2024).

*High politics* merujuk pada hubungan diplomatik antara ketiga negara, dengan penekanan khusus pada diplomasi puncak. Isu-isu *high politics* mencakup semua hal yang vital bagi keamanan nasional, termasuk aliansi militer, kerja sama keamanan regional, serta langkah-langkah dan pertukaran untuk membangun kepercayaan. Kerja sama dalam isu-isu *high politics* dianggap sebagai tindakan yang sangat sensitif, sehingga memerlukan kesepakatan politik dari pejabat tingkat tertinggi. Organisasi regional sulit untuk melewati pemerintah nasional, dan peran mereka kemungkinan akan sangat terbatas (Zhang, 2024).

Contoh nyatanya dapat terlihat dari hadirnya *Trilateral Cooperation Secretariat* (TCS) yang merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan dengan visi untuk mempromosikan perdamaian, kemakmuran bersama, dan budaya yang saling berbagi di antara Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Dengan adanya kesepakatan yang ditandatangani

dan diratifikasi oleh masing-masing pemerintah dari ketiga negara, TCS secara resmi diresmikan di Seoul pada bulan September 2011 (TCS Asia, 2011).

Pendirian TCS merupakan tonggak penting dan pencapaian signifikan dalam upaya menginstitutionalisasi kerja sama trilateral di antara ketiga negara, yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1999. Dengan adanya TCS, ketiga negara dapat lebih terkoordinasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, kebudayaan, dan keamanan, sehingga memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif dan kolaborasi yang lebih efektif. Kerja sama ini diharapkan dapat mengatasi tantangan bersama dan memperkuat hubungan antarnegara, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di ketiga negara secara keseluruhan (TCS Asia, 2011).

Dalam konteks Asia Timur, salah satu contoh penting dari kerja sama trilateral adalah *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) yang melibatkan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, yang masuk ke dalam *low politics*. Hal ini karena TEMM fokus pada isu-isu lingkungan dan perlindungan sumber daya alam, yang merupakan masalah fungsional dan non-tradisional. Isu-isu tersebut biasanya tidak terlalu dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang kompleks dan memerlukan tingkat konsensus politik yang lebih rendah. Namun, kerja sama dalam konteks *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) dapat menjadi *high politics* jika isu-isu lingkungan menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional, seperti bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas regional atau konflik sumber daya, ketika masalah tersebut menjadi bagian dari negosiasi yang lebih luas terkait aliansi militer atau kerja sama keamanan antara Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta jika kebijakan lingkungan memiliki dampak besar pada sektor ekonomi strategis, seperti energi atau industri, yang berdampak pada kesejahteraan nasional, dan ketika isu-isu lingkungan memicu ketegangan atau konflik antara negara-negara, sehingga

memerlukan intervensi diplomatik di tingkat tinggi untuk meredakan situasi.

Kerja sama ini memungkinkan ketiga negara untuk berkolaborasi dalam menangani tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim dengan cara yang lebih pragmatis dan berbasis kepentingan bersama. TEMM bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam melindungi lingkungan dan menangani isu-isu seperti pencemaran air dan perubahan iklim. Konsep kerja sama trilateral dapat diterapkan untuk memahami bagaimana negara-negara ini bekerja sama dalam menghadapi tantangan lingkungan yang saling terkait.

Dalam penelitian ini akan memfokuskan kepada pengembangan yang dilakukan ketiga negara dalam perubahan iklim. Data menunjukkan bahwa bahwa ketiga negara tersebut telah mengambil berbagai langkah signifikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan praktik berkelanjutan. Misalnya, Tiongkok telah berkomitmen untuk mencapai puncak emisi karbon sebelum tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Disisi lain, Jepang telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi energi dan memperluas penggunaan energi terbarukan. Sementara itu, Korea Selatan juga aktif dalam mengembangkan kebijakan hijau dan teknologi ramah lingkungan, termasuk program energi terbarukan dan transportasi yang berkelanjutan. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa isu-isu lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan memerlukan kerja sama yang sinergis antara negara-negara yang terdampak. Dalam hal ini, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok telah berupaya bersama untuk mengatasi tantangan pencemaran udara dan perubahan iklim yang mempengaruhi kawasan mereka. Melalui TEMM, ketiga negara ini telah menciptakan platform untuk berbagi pengetahuan dan teknologi, serta merumuskan kebijakan bersama yang mendukung keberlanjutan. Ini terlihat dari langkah-langkah yang telah diambil

Jepang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, yang seringkali terpengaruh oleh faktor - faktor eksternal.

Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, emisi gas rumah kaca Jepang pada tahun 2020 tercatat sekitar 1,1 miliar ton CO<sub>2</sub> eq, menunjukkan penurunan sekitar 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Jepang berkomitmen untuk mengurangi emisinya sebesar 46% pada tahun 2030 dibandingkan dengan level tahun 2013 (Ministry of the Environment Government of Japan, 2020). Selain itu, dalam konteks proyek kerja sama, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok telah melaksanakan berbagai proyek kolaboratif, termasuk pengelolaan limbah elektronik, di mana Jepang berkontribusi dengan teknologi dan praktik terbaik.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup negara dan institusi internasional seperti TEMM. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas kerja sama internasional dalam mencapai tujuan keberlanjutan, serta menjelaskan bagaimana interaksi antarnegara dalam kerangka Kerja Sama Trilateral dapat berkontribusi pada pengelolaan isu-isu lingkungan di Jepang.

### **1.5.2 *Green Sustainability***

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai diperkenalkan kepada publik pada pertengahan 1980-an sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antara masalah lingkungan dan dampak ekologi yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, serta mempertimbangkan aspek sosial dan politik yang menyertainya. Pengenalan konsep ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan literasi lingkungan selama era 1960-1980 (Robinson, 2004:370). Berbagai pertimbangan mengenai isu lingkungan ini telah melahirkan sejumlah teori terkait yang telah menjadi fokus perhatian sejak abad ke-19, salah satunya *Green Sustainability*.

*Green Sustainability* diajukan oleh Newell (2019) sebagai jantung dari politik global, karena seluruh bidang kajian, diskursus, dan teori-

teori secara normatif dimaksudkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Konsep ini mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi, menciptakan kerangka kerja yang holistik dalam menghadapi tantangan global saat ini. Dalam konteks ini, *Green Sustainability* berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati (Newell, 2019).

Lebih jauh lagi, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa *Green Sustainability* adalah teori modern yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Teori ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi secara harmonis, dengan tujuan utama untuk melindungi lingkungan serta memastikan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Dalam perspektif ini, *Green Sustainability* tidak hanya sekadar praktik lingkungan, tetapi juga merupakan pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Fokus utamanya adalah pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dalam menghadapi berbagai isu lingkungan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara pembangunan dan pelestarian (Hutton et al, 2007).

Di antara isu-isu tersebut, muncul dua konsep utama, yaitu *preservationist* dan *conservationist*. Konsep *preservationist*, yang memiliki akar dalam tradisi spiritual transendentalisme Amerika dan romantisisme Eropa, menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dalam kondisi aslinya, tanpa mengizinkan kerusakan atau eksploitasi. Pendukung konsep ini percaya bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dilindungi, sehingga mengadvokasi perlunya kawasan konservasi yang bebas dari intervensi manusia. Pendekatan ini sering kali melibatkan pembentukan taman nasional atau kawasan lindung yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem alami.

Sebaliknya, konsep *conservationist* menawarkan pendekatan alternatif yang lebih pragmatis dengan fokus pada perlindungan lingkungan saat ini serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendukung konsep ini mengakui bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk menggunakan sumber daya alam, tetapi menekankan pentingnya pengelolaan yang bijaksana agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Konsep ini sering melibatkan praktik seperti pengelolaan hutan berkelanjutan, pertanian yang ramah lingkungan, dan penggunaan sumber daya alam yang efisien tanpa merusak ekosistem.

Kedua konsep ini berakar dari pemikiran utilitarian dan filosofi sosial yang mendasari pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan (Robinson, 2004). Dalam konteks Asia Timur, salah satu contoh penting dari *Green Sustainability* adalah *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) yang melibatkan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, yang masuk ke dalam konsep *conservationist* karena fokusnya pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan upaya perlindungan lingkungan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan saat ini, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap generasi mendatang. TEMM mencerminkan kolaborasi antarnegara dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, sehingga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian alam.

*Green Sustainability* menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan lingkungan dan kebijakan sosial. Dalam politik global, isu-isu seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan pembangunan ekonomi saling berhubungan. Misalnya, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang rentan, seperti komunitas yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) telah menghasilkan

kebijakan berupa *Action Plan for Low Carbon Society*, yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan teknologi ramah lingkungan.

*Action Plan* ini tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga mencakup aspek sosial dengan mengintegrasikan program-program yang mendukung masyarakat yang terdampak, seperti dekarbonisasi dalam konteks industri hijau, serta *renewable energy* untuk menekan emisi di berbagai sektor sosial. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan industri hijau guna memastikan bahwa transisi menuju masyarakat rendah karbon tidak meninggalkan kelompok-kelompok yang paling rentan dan tetap memperhatikan keadilan sosial. Pendekatan ini mencerminkan komitmen TEMM dalam mendukung keberlanjutan untuk pendekatan yang holistik dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga adil secara sosial (Newell, 2019). Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB, yang menekankan pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (United Nations, 2015). Dengan begitu, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan tetapi juga dengan keadilan sosial dan ekonomi, yang berarti setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat (Dempsey et al., 2011).

Dalam politik global, aktor-aktor seperti negara, organisasi internasional, LSM, dan sektor swasta memainkan peran penting dalam mempromosikan *Green Sustainability*. Kerja sama internasional, seperti *Paris Agreement*, mencerminkan upaya kolektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan mekanisme pasar yang adil (Hale, 2016). Selain itu, sektor swasta semakin diharapkan untuk berkontribusi melalui praktik bisnis yang berkelanjutan dan inovasi teknologi hijau (Newell, 2019). Meskipun *Green Sustainability* menawarkan banyak

peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, tantangan tetap ada. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang, serta resistensi terhadap perubahan kebijakan menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif dalam mencapai keberlanjutan (Newell, 2019).

Asumsi dasar dari teori *Green Sustainability* adalah bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis, memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. *Green Sustainability* menekankan bahwa pemangku keputusan perlu mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap keseimbangan ekosistem, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan bisnis (O'Brien, 1999). Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dituntut untuk merencanakan strategi jangka pendek tetapi juga harus memperhatikan perencanaan jangka panjang yang mencakup aspek lingkungan.

Hubungan antara teori *Green Sustainability* dan penelitian mengenai implementasi *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) di Jepang terletak pada upaya kolaboratif untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi. TEMM menyediakan platform bagi Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Misalnya, Jepang telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks *Green Sustainability*, Jepang telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Salah satu contohnya adalah komitmen Jepang untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, yang mencerminkan upaya negara tersebut untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, dijelaskan bahwa Jepang

berencana untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan (Ministry of the Environment Government of Japan, 2020).

Selain itu, Jepang juga aktif dalam program-program internasional yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti TEMM. Melalui TEMM, Jepang berkolaborasi dengan Korea Selatan dan Tiongkok untuk mengatasi isu-isu lingkungan yang bersifat transnasional, seperti *climate change*. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Asia Timur, tetapi juga untuk memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Dengan demikian, hubungan antara teori *Green Sustainability* dan implementasi TEMM di Jepang menunjukkan bahwa kolaborasi internasional dan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan sangat penting dalam mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini.

## **1.6 Asumsi Penelitian**

Asumsi yang disusun dalam penelitian ini perlu dijelaskan dan diyakini kebenarannya berdasarkan teori yang relevan. Asumsi ini terkait dengan kerangka pemikiran yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, dan teori-teori yang telah dirumuskan penulis. Sebagai praduga sementara, kebenaran asumsi ini masih perlu diuji dalam proses penelitian. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya penulis menarik asumsi bahwa implementasi program *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) memiliki potensi untuk memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif dalam penanggulangan isu lingkungan, khususnya perubahan iklim di Jepang.

Asumsi ini didasarkan pada teori Kerja Sama Trilateral yang menekankan pentingnya kerja sama dalam mengatasi tantangan lingkungan global. Dalam konteks TEMM, Jepang sebagai salah satu negara anggota memiliki peran strategis dalam memimpin inisiatif yang mencakup pertukaran teknologi, sumber daya, dan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan (Keohane, 1990). Kerja sama trilateral dalam *Tripartite Environment Ministers Meeting*

(TEMM) dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi antar Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dalam menangani isu perubahan iklim dengan integrasi kebijakan lingkungan *Action Plan for Low Carbon Society*.

Dengan adanya institusi seperti TEMM, kerja sama trilateral dapat meningkatkan keberlanjutan kebijakan di bidang perubahan iklim, menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi dialog dan koordinasi yang berkelanjutan. Selain itu, kerja sama ini akan lebih responsif terhadap perubahan dinamika geopolitik yang dapat mempengaruhi hubungan bilateral, sehingga ketiga negara harus terus menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan lingkungan yang berubah.

Kolaborasi dalam *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) akan meningkatkan Implementasi dari berbagai kebijakan dalam menghadapi perubahan iklim di kawasan Asia Timur, karena pendekatan *Green Sustainability* yang mengintegrasikan berbagai isu lingkungan. TEMM diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang responsif terhadap tantangan perubahan iklim, sekaligus mendorong tindakan bersama di antara Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dampak iklim yang semakin meningkat (Newell, 2019; Hutton et al., 2007). Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, implementasi TEMM diharapkan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan memperkuat kerja sama antar negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang ada dan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Jepang dapat memaksimalkan potensi kerja sama trilateral ini dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks di kawasan Asia Timur.

## 1.7 Kerangka Analisis

